



Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Mei 2017

Halaman: 7

Raperda Menara Terancam Mundur

■ Fraksi PDI P Minta Penertiban Menara Telekomunikasi

YOGYA. TRIBUN - Sejumlah anggota DPRD Kota Yogyakarta meminta penertiban menara telekomunikasi tak hanya dilakukan di Jalan Veteran, Muja-Muja, Kecamatan Umbulharjo. Masih banyak titik menara telekomunikasi ilegal yang mengancam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik ditunda lagi pengesahannya, Jumat (12/5) huse.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Danang Rudiarmoko mengapresiasi langkah satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) menertibkan menara telekomunikasi di Jalan Veteran. Hanya saja,

Masih ada menara lain ilegal dan kami meminta ketegasan dalam penertibannya

Danang Rudiarmoko
Ketua Fraksi PDIP

masih banyak titik lain yang belum ditertibkan.

"Masih ada menara lain ilegal dan kami meminta ketegasan dalam penertibannya," ujar Danang, Selasa (9/5).

Dia menjelaskan, bahwa pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi yang dijadwalkan pada Jumat huse, terancam batal. Diantaranya karena masih banyaknya titik menara yang belum ditertibkan.

Kendati demikian, pihaknya juga akan mengusulkan segera membentuk tim pengawas penertiban menara yang anggotanya terdiri dari eksekutif dan legislatif. Hal tersebut juga pernah disampaikan Ketua DPRD setempat, Sujanarko yang memandang perlu adanya tim khusus yang mengawasi penertiban menara telekomunikasi ilegal ini.

Anggota Badan Musyawarah Dewan, Nasrul Khoiri menilai, secara substansi Raperda Menara Telekomunikasi sudah tak ada persoalan, kecuali hanya teknis penjadwalan paripurna. Nasrul juga menjelaskan, PKS sudah bersikap mendukung disahkan raperda tersebut supaya ada kejelasan.

"Pemerintah Kota akan memiliki acuan dalam menertibkan menara-menara tak berizin jika sudah ada pengesahan raperda," jelasnya.

Ia menjelaskan, Pemkot juga sudah menyanggupi untuk menertibkan dalam jangka waktu tiga bulan, setelah raperda itu disahkan. Dia menyebut, biasanya maksimal satu pekan sebelum raperda disahkan jadwalnya sudah masuk bamus untuk diagendakan.

"Namun hal itu bisa dilakukan dengan kewenangan khusus pimpinan dewan," jelasnya. (ala)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Sat. Pol. PP	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2. Din. PM dan Perizinan	☐ Positif	☒ Segera
3.	☒ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

Untuk diketahui

Ig. Trihastono
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005